

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, inklusivisme beragama menurut Nurcholish Madjid dibangun melalui pendekatan akademis-filosofis yang menekankan universalitas nilai-nilai agama. Madjid menawarkan pembacaan kritis terhadap teks-teks keagamaan dengan metode historis-kontekstual, menjadikan Islam relevan dengan tantangan modern tanpa kehilangan esensinya. Ia menekankan pentingnya dialog antaragama sebagai sarana epistemologis untuk membangun pemahaman bersama, serta mendorong reformasi sistem pendidikan agama yang lebih inklusif. Pemikirannya yang menolak formalisasi syariat Islam dan mendukung netralitas negara dalam urusan agama menjadi ciri khas dari visi inklusifnya.

Kedua, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memandang inklusivisme beragama melalui pendekatan praktis-kontekstual yang lebih terfokus pada implementasi nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sosial-politik. Konsep "pribumisasi Islam"-nya menekankan pentingnya menyelaraskan ajaran agama dengan budaya lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai universal Islam. Gus Dur dikenal melalui aksi nyatanya, seperti kebijakan politik yang melindungi hak-hak minoritas dan upaya dialog antaragama berbasis komunitas. Bagi Wahid, inklusivisme bukan hanya wacana, melainkan prinsip yang harus diwujudkan dalam praktik pemerintahan dan kehidupan sehari-hari.

Ketiga, meskipun memiliki kesamaan dalam menolak eksklusivisme dan mendukung pluralisme, Madjid dan Wahid berbeda dalam metodologi dan fokus perjuangan. Madjid lebih menekankan pembaruan pemikiran melalui karya akademis dan pendidikan, sementara Wahid mengedepankan pendekatan politis dan kultural dalam memperjuangkan kerukunan sosial. Madjid cenderung menggunakan analisis teks yang mendalam, sedangkan Wahid lebih memilih interpretasi kontekstual yang adaptif terhadap realitas masyarakat. Perbedaan ini justru saling melengkapi—Madjid memberikan fondasi teoretis, sementara Wahid menunjukkan bagaimana inklusivisme dapat dijalankan secara nyata. Keduanya bersama-sama meletakkan dasar bagi perkembangan Islam yang moderat dan inklusif di Indonesia.

Keempat, Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid membangun inklusivisme melalui pendekatan teoretis-hermeneutis yang menekankan reinterpretasi teks-teks Islam klasik untuk menciptakan teologi pluralis. Sementara Wahid, sebagai produk tradisi pesantren NU, mengembangkan model inklusivisme kultural-praktis berbasis kearifan lokal dan pengalaman empiris masyarakat akar rumput. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan variasi dalam basis sosial mereka.

Madjid bergerak di lingkaran intelektual perkotaan melalui lembaga seperti Paramadina, sedangkan Wahid memanfaatkan jaringan massa NU yang luas. Namun keduanya bersatu dalam visi bahwa pluralitas agama adalah kekayaan bangsa yang harus dipelihara, bukan ancaman yang harus ditakuti. Pemikiran mereka, yang lahir sebagai respons terhadap politik aliran Orde Baru dan trauma

konflik 1965, memberikan fondasi konseptual dan praktis bagi upaya membangun masyarakat Indonesia yang harmonis dan saling menghormati perbedaan. Warisan pemikiran kedua tokoh ini tetap relevan hingga kini sebagai kerangka acuan dalam menghadapi tantangan kontemporer terkait relasi antaragama di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk mengembangkan wacana dan praktik inklusivisme beragama di Indonesia. *Pertama*, penting untuk memperkuat pendidikan inklusif dengan mengintegrasikan nilai-nilai pluralisme ke dalam kurikulum pendidikan agama, baik di sekolah maupun pesantren, mengacu pada pendekatan dialogis Nurcholish Madjid dan kontekstualisasi budaya ala Abdurrahman Wahid. *Kedua*, pemerintah perlu merumuskan kebijakan publik yang berbasis pluralisme, seperti memperluas perlindungan hak-hak minoritas dan mendorong program dialog antaragama berbasis komunitas. *Ketiga*, tokoh agama dan organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah perlu merevitalisasi peran mereka sebagai pelopor kerukunan melalui forum lintas iman dan pelatihan moderasi beragama.

Di tingkat akademik, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji implementasi pemikiran inklusivisme kedua tokoh di era digital, termasuk tantangan baru seperti radikalisme online dan polarisasi di media sosial. Selain itu, upaya dokumentasi dan diseminasi pemikiran Madjid dan Wahid harus ditingkatkan melalui platform digital yang mudah diakses generasi muda. Pada tingkat masyarakat, LSM dan komunitas lokal perlu didorong untuk mengembangkan proyek kerukunan berbasis kearifan lokal, mengikuti model

pemberdayaan Gus Dur atau pendekatan intelektual Cak Nur. *Terakhir*, pemikiran inklusif kedua tokoh ini dapat menjadi rujukan dalam merespons isu global seperti migrasi, krisis ekologi, dan konflik identitas, dengan menekankan kolaborasi antaragama sebagai solusi. Dengan implementasi rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan warisan pemikiran Madjid dan Wahid dapat terus relevan dalam membangun masyarakat Indonesia yang harmonis dan inklusif.